

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI YANG DIGUNAKAN TANPA IZIN (Studi: Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

**Oleh:
WULAN LAMDANI**

Permasalahan desain industri pada masa sekarang semakin kerap terjadi. Mengingat hal tersebut, maka penting untuk suatu desain industri mendapat perlindungan. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap hak desain industri di Indonesia, dengan fokus pada implementasi aturan yang berlaku dan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap hak desain industri berdasarkan undang-undang desain industri, kesesuaian *ratio decidendi* ditinjau dari prinsip kebaruan dan akibat hukum putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 bagi para pihak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi putusan, studi pustaka dan *literatur review*. Serta analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum desain industri di Indonesia dilakukan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif, sedangkan dalam putusan 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 menggunakan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum secara represif diberikan sebagai bentuk perlindungan setelah adanya pelanggaran dan dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. *Ratio decidendi* dari putusan Nomor 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 terkait prinsip kebaruan bahwa desain industri yang didaftarkan Penggugat tidak memenuhi unsur kebaruan (*novelty*) karena desain tersebut telah ada dan diketahui sebelumnya. Akibat hukum permohonan kasasi dari Penggugat (Pemohon Kasasi) ditolak karena keberatan-keberatannya tidak beralasan. Hak eksklusif atas desain industri tidak diberikan kepada Penggugat karena desain tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur kebaruan.

Kata Kunci: Pemegang Hak Desain, Perlindungan Desain Industri, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR HOLDERS OF INDUSTRIAL DESIGN RIGHTS USED WITHOUT PERMISSION

(Study: Decision Number 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020)

By:

WULAN LAMDANI

Industrial design issues are becoming increasingly common nowadays. Given this, it is important for industrial designs to be protected. This study discusses legal protection for industrial design rights in Indonesia, focusing on the implementation of applicable regulations and dispute resolution through court decisions, particularly Decision Number 104 K/Pdt.Sus HKI/2020. The purpose of this study is to analyze the legal protection of industrial design rights based on industrial design laws, the suitability of the ratio decidendi in terms of the principle of novelty, and the legal consequences of Decision Number 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 for the parties involved.

The type of research used is normative research, with a descriptive research type, and uses a normative juridical approach. The data used in this study are primary and secondary data. The data collection methods used are decision studies, literature studies, and literature reviews, as well as qualitative data analysis.

The results of the study show that industrial design legal protection in Indonesia is carried out in two forms, namely preventive and repressive, whereas in decision 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020, repressive legal protection is used. Repressive legal protection is provided as a form of protection after a violation has occurred and can impose sanctions on the perpetrator of the violation. The ratio decidendi of decision No. 104 K/Pdt.Sus-HKI/2020 relates to the principle of novelty, namely that the industrial design registered by the Plaintiff does not meet the element of novelty because the design already existed and was known previously. The legal consequence is that the Plaintiff's (Appellant's) cassation petition was rejected because the objections were unfounded. Exclusive rights to the industrial design were not granted to the Plaintiff because the design was declared not to meet the novelty requirement.

Keywords: Design Rights Holder, Industrial Design Protection, Court Decision